



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS
KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat Renja Kerja Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan Kerja Kecamatan Sukorejo untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat RKA Kerja Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kerja Kecamatan Sukorejo serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kerja Kecamatan Sukorejo, hasil evaluasi Renja Kerja Kecamatan Sukorejo tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kerja Kecamatan Sukorejo tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kerja Kecamatan Sukorejo.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 70



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
OPD KECAMATAN SUKOREJO**

**Jl. Matoa Raya No. 01 Dusun Glatik Desa Glagahsari
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
Telp. (0343) 612345
SUKOREJO 67161**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya kami masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyusun Rencana Kerja PD Kecamatan Sukorejo tahun 2022.

Rencana Kerja PD Kecamatan Sukorejo tahun 2022 disusun dimaksudkan untuk mengetahui kondisi umum Wilayah, Potensi serta berbagai permasalahan kedepan yang perlu untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Pasuruan.

Disamping itu Rencana Kerja PD Kecamatan Sukorejo tahun 2022 ini adalah sebagai acuan untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak menyimpang dari perencanaan dan setidak-tidaknya merupakan tolak ukur untuk bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang dicapai.

Demikian kiranya semoga Rencana Kerja PD Kecamatan Sukorejo tahun 2022 dapat membawa mamfaat serta sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas kedepan ditahun 2022 mendatang.

Pasuruan, April 2021

CAMAT SUKOREJO

ttd.

MUJIONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19700507 199101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Kata Pengantar	i
2. Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	13
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Sukorejo.....	26
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Kecamatan Sukorejo	42
3.3 Program dan Kegiatan	44
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
V. PENUTUP	
5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian.....	58
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	58
5.3 Rencana Tindak Lanjut	59

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

RENCANA KERJA
KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sukorejo. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Sukorejo mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengh Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun didasarkan pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 5 tahun kedua & RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun terakhir. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah dengan menuangkan visi, misi, strategi, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan

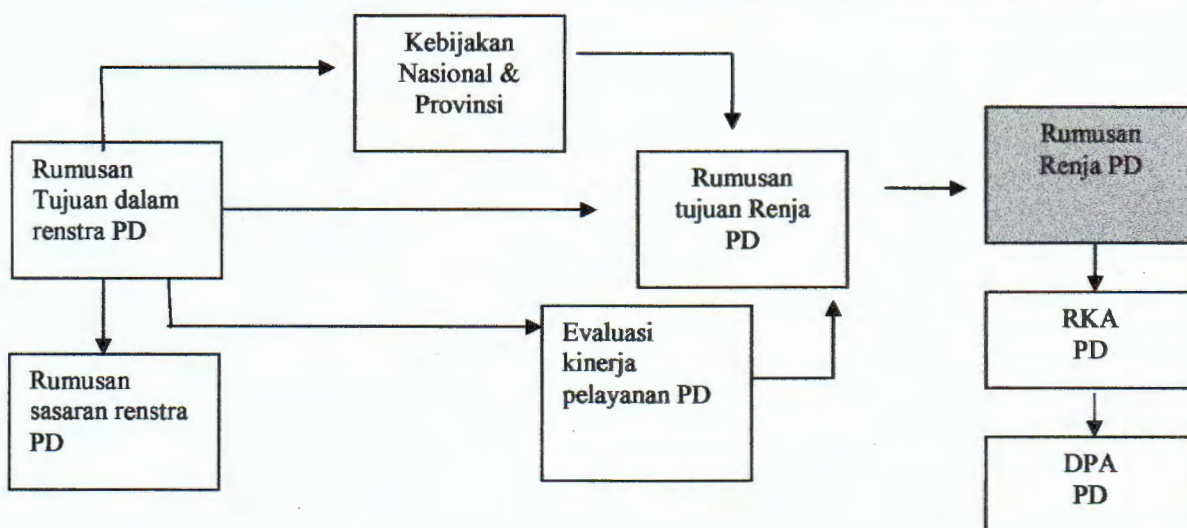
dengan mencantumkan ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2022 menggambarkan visi, misi, strategi, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan Kecamatan Sukorejo. Komponen yang ada mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis dan strategis untuk mengimplementasikan sasaran – sasaran daerah yang telah dituangkan dalam pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan.

Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Satuan Kerja yang bersangkutan.

Perumusan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo tidak lepas dari pengamatan potensi daerah yang dimiliki oleh Kecamatan Sukorejo. Pengembangan dan pematapan potensi yang meliputi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia terus dikembangkan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukorejo pada khususnya dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya, sebagaimana diagram dibawah ini :

Perumusan tujuan & sasaran rencana kerja perangkat daerah



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan

Sukorejo untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Sukorejo merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Sukorejo untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018 ;
3. Renja Kecamatan Sukorejo merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2018 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sukorejo merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Sukorejo yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Sukorejo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Sukorejo dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Sukorejo, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sukorejo pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sukorejo yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Sukorejo dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Sukorejo, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Sukorejo sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan

arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2009-2016 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Sukorejo yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sukorejo;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Sukorejo.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur no. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur no. 7 Tahun

- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
 24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Renstra Kecamatan Sukorejo kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
 25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
 26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 27. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
 28. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012,

Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ,
Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi
Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender
(PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender (PPRG).

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Sukorejo adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Sukorejo dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja PD Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

1. Renja PD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja PD disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Sukorejo

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja PD Kecamatan Sukorejo disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Sukorejo. Tercapainya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut rencana PD Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh PD Kecamatan Sukorejo melalui tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keinaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	(outcome) Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	(output) Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM & intrnet	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%			
	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor;	(output) Jumlah AC & amplifier secara berkala	36 unit	4 Unit	10 unit	10 unit	100%			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;	(output) tersedianya honorarium bagi pengelola adm keuangan	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	(output) tersedianya honor petugas kebersihan	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor;	(output) Jumlah alat tulis kantor	160 jenis	47 jenis	30 jenis	30 jenis	100%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan kantor;	(output) jumlah peralatan listrik yg dibeli	36 jenis	6 jenis	10 jenis	10 jenis	100%			
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor;	(output) Jumlah peralatan & perlengkapan kantor (sapu, pel dll) yg di beli	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;	(output) Jumlah barang cetakan & penggandaan	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%			
	Penyediaan Makanan dan Minuman ;	(output) tersedianya makanan & minuman bagi peserta rapat	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	(output) Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%			
	Penyediaan Jasa Perkantoran;	(output) tersedianya honor PTT & THL	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%			
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	(output) tersedianya koran harian & majalah serta buku-buku bacaan	60 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%			
	Penyediaan Pakaian Kerja	(output) jumlah pakaian dinas pol PP	32 stel		32 stel	32 stel	100%			

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	(outcome) Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%				
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	(output) Jumlah kendaraan dinas yg diadakan	1 Unit		-	-	-				
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	(output) Jumlah peralatan rmah dinas (karpet)	1 Unit		-	-	-				
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	(output) Jumlah peralatan gedung kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%				
Pengadaan Mebelair	(output) Jumlah mebelair yg dibeli	25 Unit	3 unit							
Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional;	(output) Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan	35 Unit	7 unit	7 Unit	7 Unit	100%				
Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan kantor;	(output) jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	60 Unit	10 unit	15 Unit	15 Unit	100%				
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	(output) jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	5 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket	100%				
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	(output) jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	2 Paket	1 Paket	-	-	-				
Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	(output) jumlah mebelair yang dilakukan pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100%				
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	(output) jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	1 Paket		-	-	-				
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	(output) jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	12 Unit		-	-	-				
Urusan Kewilayahan										
Bidang Urusan Kewilayahan										
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Sukorejo	(outcome) Nilai SKM Kecamatan, Nilai SAKIP Kecamatan	100%		100%	100%	100%				
Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan	(output) terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	20 Kali		20 Kali	20 Kali	100%				
Peningkatan sumber daya aparatur kecamatan	(output) terlaksananya kegiatan peningkatan SDA kecamatan (outbond)	15 Orang		15 Orang	15 Orang	100%				
Fasilitasi & koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	(output) Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan,keperingatan hari-hari besar nasional,manajemen aset/barang daerah & monev reklame insidentil	60 Bulan		60 Bulan	60 Bulan	100%				
Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	(output) Nilai SAKIP yang baik	20 Buku		20 Buku	20 Buku	100%				

Pendidikan dan Pelatihan Formal	(output) ASN mengikuti pendidikan & pelatihan formal	2 orang								
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Sukorejo	(outcome) Jumlah Lembaga Masyarakat yang di bina	100%		100%	100%	100%				
Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	(output)Terlaksananya forum tingkat kecamatan (musrenbang)	5 Kali		5 Kali	5 Kali	100%				
Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	(output) Terlaksananya kegiatan Peenyuluhan narkoba, senam bersama, fasilitasi, MTQ, mana qib & santunan anak yatim	15 Kegiatan		15 Kegiatan	15 Kegiatan	100%				
Koordinasi pemberdayaan masyarakat	(output) Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan & pelatihan bagi pemuda, pemberdayaan UKM & karangtaruna	60 Bulan		60 Bulan	60 Bulan	100%				
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan sukorejo	(outcome) % penyelesaian kasus kamtrantibmas yang ditindak lanjuti sesuai kewenangan kecamatan	100%		100%	100%	100%				
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal	(output) Terlaksananya kegiatan pelatihan anggota satlinmas di wil kec sukorejo	3 paket		3 paket	3 paket	100%				
Fasilitasi penegakan perda	(output) Terlaksananya kegiatan sosialisasi perda kamtrantibmas	240 Orang		240 Orang	240 Orang	100%				
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban kecamatan	Terlaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec Nguling	16 Kali		16 Kali	16 Kali	100%				
Program peningkatan disiplin aparatur	(outcome) Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%				
Pengadaan pakaian DinasBeserta Perlengkapannya	(output) jumlah pakaian dinas pol PP	7 stel	7 stel	7 stel	7 stel	100%				
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	(output) jumlah pakaian olahraga yang terbeli	7 stel	7 stel	7 stel	7 stel	100%				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	(outcome) Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%				
Pendidikan & pelatihan formal	(output) ASN mengikuti pendidikan & pelatihan formal	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(outcome) % aspirasi masyarakat dan permintaan pelayanan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%				

Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	(output) Terlaksananya forum tingkat kecamatan (musrenbang)	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%				
Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	(output) Nilai SAKIP yang baik	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%				
Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	(outcome) % aspirasi masyarakat dan permintaan pelayanan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%				
Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	(output) Terlaksananya kegiatan Peenyuluhan narkoba, senam bersama, fasilitasi, MTQ, mana qib & santunan anak yatim	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%				
Koordinasi pemberdayaan masyarakat	(output) Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan & pelatihan bagi pemuda, pemberdayaan UKM & karangtaruna	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%				
Program Fasilitasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	(outcome) % aspirasi masyarakat dan permintaan pelayanan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%				
Fasilitasi & koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	(output) Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan, keperingatan hari-hari besar nasional, manajemen aset/barang daerah & monev reklame insidental	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%				
Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	(outcome) % penyelesaian kasus kamtrantibmas yang ditindak lanjuti sesuai kewenangan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%				
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban kecamatan	(output) Terlaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec sukorejo	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%				
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	(outcome) Prosentase Desa/kelurahan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%				
Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	(output) terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%				
2021										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	-	-					100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	-	-					100%	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 Dokumen	-	-						1 Dokumen		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja PD	1 Dokumen	-	-						1 Dokumen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	-	-						100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang-bulan	-	-						224 Orang-bulan		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	204 Orang-bulan	-	-						204 Orang-bulan		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelakupengadaan barang/jasa	84 Orang-bulan	-	-						84 Orang-bulan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	-						100%		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	-	-						2 Orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	-	-						100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	-	-						7 Jenis		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Jenis	-	-						22 Jenis		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	36 Jenis	-	-						36 Jenis		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	8 Jenis	-	-						8 Jenis		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	100 Orang	-	-						100 Orang		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	12 laporan	-	-						12 laporan		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	-						100%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 Unit	-	-						4 Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang Nilai	100%	-	-						100%		

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	96 Rekening-bulan	-	-					96 Rekening-bulan	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	-	-					7 Unit	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	-					100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	-	-					5 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	1 Unit	-	-					1 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralat gedung/kantor	3 Jenis	-	-					3 Jenis	
Urusan Kewilayahan			-	-						
Bidang Kewilayahan			-	-						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	-	-					100%	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	41 Laporan	-	-					41 Laporan	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	2 Laporan	-	-					2 Laporan	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Laporan	-	-					39 Laporan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina	8 Lembaga Masyarakat	-	-					8 Lembaga Masyarakat	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	-	-					6 Laporan	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	-	-					6 Laporan	
PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	83 %	-	-					83 %	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	70 %	-	-						70 %		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	4 Laporan	-	-						4 Laporan		

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2020

Anggaran belanja / pengeluaran Kecamatan Sukorejo tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.3.766.814.300- dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 3.302.824.578,- atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 463.989.722,- dari pagu anggaran. Anggaran PD Kecamatan Sukorejo terbagi menjadi 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp 3.302.824.578,- atau 87,68 % dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Sukorejo dapat diuraikan sebagai berikut:

KODE	URAIAN	TAHUN 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	%
2.	BELANJA	3.766.814.300,-	3.306.773.978,-	87,79
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.021.349.000,-	1.668.498.835,-	82,54
2.1.01.	Belanja Pegawai	2.021.349.000,-	1.668.498.835,-	82,54
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.082.532.000,-	1.015.796.003,-	93,00
	Tambahan penghasilan PNS (TPP)	938.817.000,-	652.702.832,-	69,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.745.465.300,-	1.638.275.143,-	93,86
2.2.01.	Belanja Pegawai	171.240.000,-	159.915.000,-	93,39
2.2.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.443.154.200,-	1.363.642.643,-	94,49
2.2.03.	Belanja Modal	131.071.100,-	114.717.500,-	87,52

Target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2020		%
	ANGGARAN	REALISASI	
BELANJA DAERAH			
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.021.349.000,-	1.668.498.835,-	82,54
1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	834.803.000,-	781.259.521,-	93,00
2. Tunjangan Keluarga	99.561.000,-	94.126.788,-	94,54
3. Tunjangan Jabatan	75.320.000,-	70.860.000,-	94,07
4. Tunjangan Fungsional Umum	22.933.000,-	22.070.000,-	96,23
5. Tunjangan Beras	47.021.000,-	44.683.140,-	95,02
6. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.822.000,-	2.782.668,-	98,60
7. Pembulatan Gaji	72.000,-	13.886,-	19,28
8. Tambahan penghasilan PNS (TPP)	938.817.000,-	652.702.832,-	69,52
BELANJA LANGSUNG	1.745.465.300,-	1.638.275.143,-	93,86
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	703.397.900,-	683.350.961,-	97,15
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.220.000,-	42.031.645,-	89,01
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,-	5.995.000,-	99,92
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36.240.000,-	36.240.000,-	100,00
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000,-	36.000.000,-	100,00
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000,-	29.839.300,-	99,46
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.898.900,-	29.657.000,-	99,19
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	14.483.000,-	13.532.000,-	93,43
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.671.000,-	11.887.000,-	67,27
	4.600.000,-	4.346.500,-	94,49

9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	55.585.000,- 150.000.000,-	55.390.000,- 149.932.516,-	99,65 99,96
10. Penyediaan Makanan dan Minuman			
11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	275.700.000,-	268.500.000,-	97,39
12. Penyediaan Jasa Perkantoran			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAN APARATUR	541.576.100,-	512.724.782,-	94,67
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	49.071.100,-	40.020.000,-	81,55
2. Pengadaan Mebelair	40.000.000,-	35.052.500,-	87,63
3. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	200.000.000,-	199.269.407,-	99,63
4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	134.000.000,-	126.780.000,-	94,61
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	111.505.000,-	104.632.875,-	93,83
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan kantor	7.000.000,-	6.970.000,-	99,57
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	7.500.000,-	7.500.000,-	100,00
1. Pendidikan & pelatihan formal	7.500.000,-	7.500.000,-	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.200.000,-	13.027.500,-	91,74
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	8.000.000,-	6.982.500,-	87,28
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	6.200.000,-	6.045.000,-	97,50
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19.256.000,-	18.183.300,-	94,43
1. Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	17.005.000,-	16.905.000,-	99,41
2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	2.251.000,-	1.278.300,-	56,78
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	225.740.000,-	203.460.000,-	90,13
1. Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	148.080.000,-	138.445.000,-	93,49
2. Koordinasi pemberdayaan masyarakat	77.660.000,-	65.015.000,-	83,72
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.147.300,-	19.204.100,-	95,31
1. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	20.147.300,-	19.204.100,-	95,31
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	87.908.000,-	65.446.000,-	74,45
1. Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	87.908.000,-	64.446.000,-	74,45
PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	125.740.000,-	115.378.500,-	91,76
1. Fasilitasi & koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	125.740.000,-	115.378.500,-	91,76
SURPLUS/(DEFISIT)	(3.766.814.300,-)	(3.306.773.978,-)	87,79

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sukorejo sampai dengan triwulan keempat tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan Renja dan Renstra yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama

pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Beberapa hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dapahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan.
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukorejo dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan

Sukorejo dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.

3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

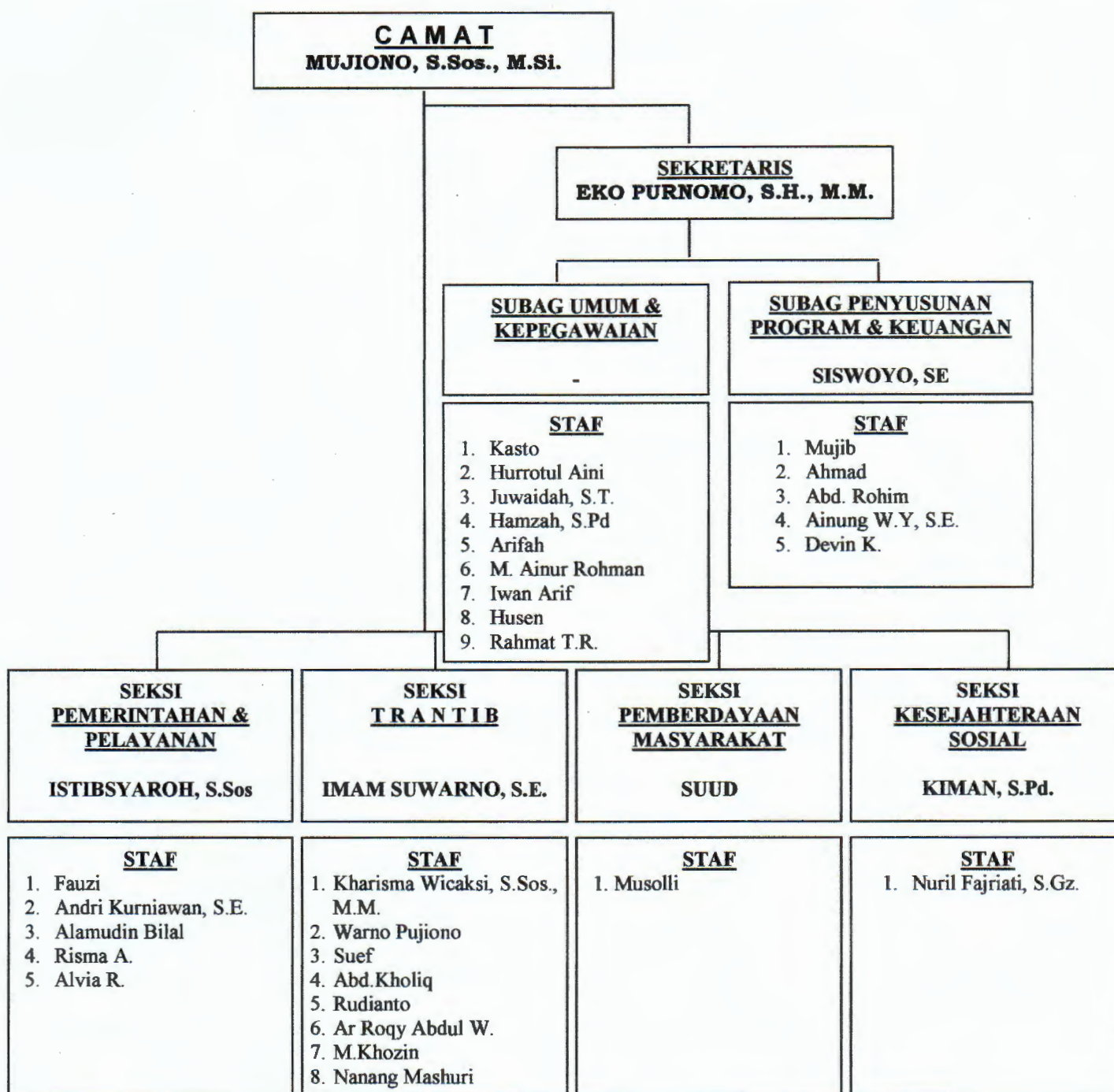
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka susunan organisasi Kecamatan Sukorejo dimaksud terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan yang terdiri :
 - a. Kasubag Umum & Kepegawaian
 - b. Kasubag Penyusunan Program & Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUKOREJO

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016)



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

PD Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Sukorejo akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sukorejo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Sukorejo meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 Tahap kedua (2010-2015)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-Tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)			89,00	89,50	90,00	90,50	89,34	-	90,00	90,50	Capaian IKM mengalami kenaikan setiap tahun dan selalu mencapai target sehingga mengalami penyesuaian pada target ditahun berikutnya, Kami juga terus melakukan perbaikan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyesuaikan regulasi pada saat ini
2	Nilai SAKIP Kecamatan			69,00	72,00	74,00	76,00	70,94	-	74,00	76,00	Begitu jg dengan capaian SAKIP setelah mencapai target kami sesuaikan target ditahun berikutnya, meskipun nilai SAKIP telah mencapai target namun pada umumnya nilai kita masih jauh dari nilai yang seharusnya maka dari itu kita terus berupaya dalam meningkatkan implementasi SAKIP di Kecamatan Sukorejo

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Sukorejo, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Sukorejo sebagai berikut:

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	<p>Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu di tingkatkan</p> <p>Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu di tingkatkan</p> <p>Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu di tingkatkan</p>	Pelayanan Publik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja PD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh PD Kecamatan Sukorejo sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja PD seperti pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukorejo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Pentil
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	3.025.152.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	2.809.394.135	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	38.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 Dokumen	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Jumlah evaluasi kinerja PD	1 Dokumen	35.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 Dokumen	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	2.275.652.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	2.599.715.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang-bulan	1.849.232.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang-bulan	2.173.295.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	204 Orang-bulan	389.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	204 Orang-bulan	389.400.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelakupengadaan barang/jasa	84 Orang-bulan	37.020.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelakupengadaan barang/jasa	84 Orang-bulan	37.020.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sukorejo	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sukorejo	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	256.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	65.800.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Jenis	6.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Jenis	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah bahan logistik	36 Jenis	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah bahan logistik	36 Jenis	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sukorejo	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sukorejo	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	3.000.000	

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Sukorejo	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	100 Orang	10.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Sukorejo	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	100 Orang	2.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	12 laporan	160.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	12 laporan	39.300.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	30.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 Unit	30.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 Unit	5.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (PenunjangNilai)	100%	70.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (PenunjangNilai)	100%	53.879.135
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama12 bulan	96 Rekening-bulan	65.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama12 bulan	96 Rekening-bulan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	7 Unit	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	7 Unit	3.879.135
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	335.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	85.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional	5 Unit	160.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional	5 Unit	80.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/ kantor	1 Unit	165.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/ kantor	1 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatagedung/kantor	3 Jenis	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatagedung/kantor	3 Jenis	5.000.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhanpenunjang urusanpemerintahan	100%	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhanpenunjang urusanpemerintahan	100%	17.475.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	41 Laporan	150.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	41 Laporan	17.475.000
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Koördinasi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	2 Laporan	90.000.000	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	2 Laporan	15.000.000

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Laporan	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Laporan	2.475.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sukorejo	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina	8 Lembaga Masyarakat	209.080.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sukorejo	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina	8 Lembaga Masyarakat	14.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	209.080.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	14.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	209.080.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	14.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sukorejo	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	83 %	25.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sukorejo	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	83 %	9.905.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sukorejo	Presentase Penyelesaian kasus Kamtibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	70 %	25.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sukorejo	Presentase Penyelesaian kasus Kamtibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	70 %	9.905.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	4 Laporan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	4 Laporan	9.905.000	
JUMLAH					3.409.232.000	JUMLAH					2.850.774.135

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja OPD Kecamatan Sukorejo Tahun 2022 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses buttom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Renja PD Kecamatan Sukorejo saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan OPD Kecamatan Sukorejo mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sukorejo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan seperti pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukorejo

No (1)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran/ Volume (5)	Catatan (6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Jumlah evaluasi kinerja PD	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang-bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	204 Orang-bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelakupengadaan barang/jasa	84 Orang-bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Sukorejo	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Jenis
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah bahan logistik	36 Jenis
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Sukorejo	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sukorejo	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	100 Orang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sukorejo	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	12 laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sukorejo	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang Nilai	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sukorejo	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	96 Rekening-bulan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukorejo	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sukorejo	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	1 Unit

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukorejo	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatagedung/kantor	3 Jenis	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sukorejo	Persentase pemenuhanpenunjang urusanpemerintahan	100%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	41 Laporan	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	2 Laporan	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Laporan	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sukorejo	Jumlah LembagaMasyarakat Yang Dibina	8 Lembaga Masyarakat	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sukorejo	Rasio jumlah kejadian yangterfasilitasi terhadap jumlahkejadian sesuai dengankewenangan kecamatan	83 %	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sukorejo	Presentase Penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	70 %	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukorejo	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggraraanketentraman dan ketertiban umum	4 Laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sukorejotelah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran yakni :

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintahan	Masyarakat umum
2	Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan	Sarana yang memadai di	Masyarakat umum

	merata melalui Musrenbang RKPD	masyarakat	
3	Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.	Ekonomi merata di segala bidang	Masyarakat umum
4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi /LSM/masyarakat umum

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategik ini, maka Kecamatan Sukorejo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Pasuruan untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dalam mencapai Tujuan dan sasarannya menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan

Indikator kinerja sasaran ada 2 (satu), yaitu :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2. Nilai SAKIP Kecamatan

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global.
- d. Memiliki integritas moral, etik, spiritual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai – nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran strategik Kecamatan Sukorejo merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategis Kecamatan Sukorejo pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari 4 program dan 10 kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Merujuk pada PP No. 12 Tahun 2019 dan permendagri 90 tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodefikasi nomenklatur sesuai permendagri 90 tahun 2019, seperti pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sukorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		100%	2.809.394.135			100%	3.090.333.549
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	Persentase pemenuhan dok SAKIP		100%	-			100%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	Kec. Sukorejo	1 Dokumen	Rp -	DAU		1 Dokumen	Rp -
					<i>Belanja operasi</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja pegawai</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja bunga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja subsidi</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja hibah</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -				Rp -
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	Rp 2.599.715.000				Rp 2.859.686.500
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukorejo	224 Orang-bulan	Rp 2.173.295.000	DAU		224 Orang-bulan	Rp 2.390.624.500
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 2.173.295.000				Rp 2.390.624.500
					<i>Belanja pegawai</i> : Rp 2.173.295.000				Rp 2.390.624.500
					<i>Belanja barang dan jasa</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja bunga</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja subsidi</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja hibah</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja bantuan sosial</i> : Rp -				Rp -
					<i>Belanja modal</i> : Rp -				Rp -

					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	Kec. Sukorejo	204 Orang-bulan		Rp	389.400.000	DAU		224 Orang-bulan	Rp	428.340.000
					Belanja operasi	: Rp	389.400.000				Rp	428.340.000
					Belanja pegawai	: Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	389.400.000				Rp	428.340.000
					Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaksanaan barang/jasa	Kec. Sukorejo	84 Orang-bulan		Rp	37.020.000	DAU		84 Orang-bulan	Rp	40.722.000
					Belanja operasi	: Rp	37.020.000				Rp	40.722.000
					Belanja pegawai	: Rp	37.020.000				Rp	40.722.000
					Belanja barang dan jasa	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%		Rp	-				Rp	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kec. Sukorejo	2 Orang		Rp	-	DAU		2 Orang	Rp	-
					Belanja operasi	: Rp	-				Rp	-
					Belanja pegawai	: Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-

					Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	'Kec. Sukorejo	6 Orang		Rp	-	DAU		6 Orang	Rp
					Belanja operasi	: Rp	-			Rp	-
					Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	-			Rp	-
					Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%		Rp	65.800.000			Rp	72.380.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	'Kec. Sukorejo	7 Jenis		Rp	3.000.000	DAU		7 Jenis	Rp 3.300.000
					Belanja operasi	: Rp	3.000.000			Rp	3.300.000
					Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	3.000.000			Rp	3.300.000
					Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	'Kec. Sukorejo	22 Jenis		Rp	3.000.000	DAU		22 Jenis	Rp 3.300.000
					Belanja operasi	: Rp	3.000.000			Rp	3.300.000
					Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	3.000.000			Rp	3.300.000
					Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-

					Belanja bantuan sosial	Rp	-			Rp	-
					Belanja modal	Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	Rp	-			Rp	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	'Kec. Sukorejo	36 Jenis		Rp	15.000.000	DAU		36 Jenis	Rp 16.500.000
					Belanja operasi	Rp	15.000.000			Rp	16.500.000
					Belanja pegawai	Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	Rp	15.000.000			Rp	16.500.000
					Belanja bunga	Rp	-			Rp	-
					Belanja subsidi	Rp	-			Rp	-
					Belanja hibah	Rp	-			Rp	-
					Belanja bantuan sosial	Rp	-			Rp	-
					Belanja modal	Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	Rp	-			Rp	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	'Kec. Sukorejo	8 Jenis		Rp	3.000.000	DAU		8 Jenis	Rp 3.300.000
					Belanja operasi	Rp	3.000.000			Rp	3.300.000
					Belanja pegawai	Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	Rp	3.000.000			Rp	3.300.000
					Belanja bunga	Rp	-			Rp	-
					Belanja subsidi	Rp	-			Rp	-
					Belanja hibah	Rp	-			Rp	-
					Belanja bantuan sosial	Rp	-			Rp	-
					Belanja modal	Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	Rp	-			Rp	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	'Kec. Sukorejo	100 Orang		Rp	2.500.000	DAU		100 Orang	Rp 2.750.000
					Belanja operasi	Rp	2.500.000			Rp	2.750.000
					Belanja pegawai	Rp	-			Rp	-
					Belanja barang dan jasa	Rp	2.500.000			Rp	2.750.000
					Belanja bunga	Rp	-			Rp	-
					Belanja subsidi	Rp	-			Rp	-
					Belanja hibah	Rp	-			Rp	-
					Belanja bantuan sosial	Rp	-			Rp	-
					Belanja modal	Rp	-			Rp	-
					Belanja tidak terduga	Rp	-			Rp	-
					Belanja transfer	Rp	-			Rp	-

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	Kec. Sukorejo	12 Laporan	Rp 39.300.000	DAU	12 Laporan	Rp 43.230.000
					Belanja operasi : Rp 39.300.000			Rp 43.230.000
					Belanja pegawai : Rp -			Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 39.300.000			Rp 43.230.000
					Belanja bunga : Rp -			Rp -
					Belanja subsidi : Rp -			Rp -
					Belanja hibah : Rp -			Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -			Rp -
					Belanja modal : Rp -			Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -			Rp -
					Belanja transfer : Rp -			Rp -
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 5.000.000			Rp 5.500.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Sukorejo	4 Unit	Rp 5.000.000	DAU	4 Unit	Rp 5.500.000
					Belanja operasi : Rp -			Rp -
					Belanja pegawai : Rp -			Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp -			Rp -
					Belanja bunga : Rp -			Rp -
					Belanja subsidi : Rp -			Rp -
					Belanja hibah : Rp -			Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -			Rp -
					Belanja modal : Rp 5.000.000			Rp 5.500.000
					Belanja tidak terduga : Rp -			Rp -
					Belanja transfer : Rp -			Rp -
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang Nilai		100%	Rp 53.879.135			Rp 59.267.049
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	Kec. Sukorejo	96 Rekening-bulan	Rp 50.000.000	DAU	96 Rekening-bulan	Rp 55.000.000
					Belanja operasi : Rp 50.000.000			Rp 55.000.000
					Belanja pegawai : Rp -			Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 50.000.000			Rp 55.000.000

					Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-	
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-	
					Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-	
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-	
					Belanja modal	: Rp	-				Rp	-	
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-	
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp	-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukorejo	7 Unit			Rp	3.879.135	DAU		7 Unit	Rp	4.267.049
					Belanja operasi	: Rp		3.879.135				Rp	4.267.049
					Belanja pegawai	: Rp		-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp		3.879.135				Rp	4.267.049
					Belanja bunga	: Rp		-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp		-				Rp	-
					Belanja hibah	: Rp		-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp		-				Rp	-
					Belanja modal	: Rp		-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp		-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp		-				Rp	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%			Rp	85.000.000				Rp	93.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sukorejo	5 Unit			Rp	80.000.000	DAU		5 Unit	Rp	88.000.000
					Belanja operasi	: Rp		80.000.000				Rp	88.000.000
					Belanja pegawai	: Rp		-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp		80.000.000				Rp	88.000.000
					Belanja bunga	: Rp		-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp		-				Rp	-
					Belanja hibah	: Rp		-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp		-				Rp	-
					Belanja modal	: Rp		-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp		-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp		-				Rp	-

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	'Kec. Sukorejo	1 Unit	Rp	-	DAU	1 Unit	Rp	-
					Belanja operasi	: Rp	-		Rp	-
					Belanja pegawai	: Rp	-		Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	-		Rp	-
					Belanja bunga	: Rp	-		Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-		Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-		Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-		Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-		Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-		Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-		Rp	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatagedung/kantor	'Kec. Sukorejo	3 Jenis	Rp	5.000.000	DAU	3 Jenis	Rp	5.500.000
					Belanja operasi	: Rp	5.000.000		Rp	5.500.000
					Belanja pegawai	: Rp	-		Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	5.000.000		Rp	5.500.000
					Belanja bunga	: Rp	-		Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-		Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-		Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-		Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-		Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-		Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-		Rp	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhanpenunjang urusanpemerintahan		100%		17.475.000				19.222.500
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	'Kec. Sukorejo	41 Laporan	Rp	17.475.000			Rp	19.222.500
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	'Kec. Sukorejo	2 Laporan	Rp	15.000.000	DAU	2 Laporan	Rp	16.500.000
					Belanja operasi	: Rp	15.000.000		Rp	16.500.000
					Belanja pegawai	: Rp	-		Rp	-

					Belanja barang dan jasa	: Rp	15.000.000				Rp	16.500.000
					Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	'Kec. Sukorejo	39 Laporan		Rp	2.475.000	DAU		39 Laporan	Rp	2.722.500
					Belanja operasi	: Rp	2.475.000				Rp	2.722.500
					Belanja pegawai	: Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	2.475.000				Rp	2.722.500
					Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina		100%			14.000.000					15.400.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	'Kec. Sukorejo	6 Laporan		Rp	14.000.000				Rp	15.400.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	'Kec. Sukorejo	6 Laporan		Rp	14.000.000	DAU		6 Laporan	Rp	15.400.000
					Belanja operasi	: Rp	14.000.000				Rp	15.400.000
					Belanja pegawai	: Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	14.000.000				Rp	15.400.000
					Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp	-

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan		83%		9.905.000				10.895.500
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	Kec. Sukorejo	70%		Rp 9.905.000				Rp 10.895.500
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	Kec. Sukorejo	4 Laporan		Rp 9.905.000	DAU		4 Laporan	Rp 10.895.500
						Belanja operasi : Rp 9.905.000				Rp 10.895.500
						Belanja pegawai : Rp -				Rp -
						Belanja barang dan : Rp 9.905.000				Rp 10.895.500
						Belanja bunga : Rp -				Rp -
						Belanja subsidi : Rp -				Rp -
						Belanja hibah : Rp -				Rp -
						Belanja bantuan : Rp -				Rp -
						Belanja modal : Rp -				Rp -
						Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
						Belanja transfer : Rp -				Rp -
	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan	Kec. Sukorejo	4 Laporan		Rp -	DAU		4 Laporan	Rp -
						Belanja operasi : Rp -				Rp -
						Belanja pegawai : Rp -				Rp -
						Belanja barang dan : Rp -				Rp -
						Belanja bunga : Rp -				Rp -
						Belanja subsidi : Rp -				Rp -
						Belanja hibah : Rp -				Rp -
						Belanja bantuan : Rp -				Rp -
						Belanja modal : Rp -				Rp -
						Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
						Belanja transfer : Rp -				Rp -
						Total Belanja PD : Rp 2.850.774.135				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan tahun 2020 dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi

			<p>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</p> <p>Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
		<p>Pengadaan Barang Milik Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
		<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>
		<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</p> <p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</p>

			<p>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		<p>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p> <p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sukorejo dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Sukorejo

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sukorejo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

5. 3. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk rencana tindak lanjut maka dilaksanakan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat serta pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amien.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF